

INDIKATOR STRUKTURAL DAN KULTURAL DALAM MEMAHAMI KEMISKINAN MASYARAKAT NENOTES KECAMATAN SANTIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Meriam Tun¹, Rodriques Servatius², Veronika I.A. Boro³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia^{1,2,3}

Email: meriamtun641@gmail.com¹, rodriquesservas@gmail.com²

veronikainaassanboro@gmail.com³

ABSTRACT

This study focuses on examining structural and cultural indicators in understanding poverty among the people of Nenotes Village, Santian District, South Central Timor Regency. Using a descriptive qualitative method, the main research question is how structural and cultural indicators are manifested in understanding poverty in Nenotes Village. To analyze this issue, various measures from welfare theory are applied to capture the social and economic conditions of the community. The results show that structural indicators are related to policies that do not favor the people, income inequality, limited employment opportunities, and uneven economic structures. Meanwhile, cultural indicators are associated with individual behaviors such as laziness, low levels of education, and school dropout rates, as well as social behaviors including a consumptive culture, family burdens, and a lack of public awareness to improve welfare (an easy-going culture). Efforts to overcome poverty in Nenotes Village can be carried out by improving the quality of education and providing skills training for the community. The government needs to create broader employment opportunities and support the development of productive local enterprises. In addition, encouragement is needed for the community to change their mindset to become more independent and oriented toward improving welfare.

Keywords: *Poverty, Structural Factors, Cultural Factors, Nenotes Village.*

ABSTRAK

Penelitian berpusat pada memotret indikator struktural dan kultural dalam memahami kemiskinan masyarakat Nenotes Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana manifestasi Indikator struktural dan kultural dalam memahami kemiskinan masyarakat desa Nenotes. Untuk mencermatinnya digunakan berbagai ukuran dalam teori kesejahteraan sehingga mampu memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator struktur berkaitan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja

serta struktur ekonomi yang tidak merata. Sementara indikator kultural berkaitan dengan perilaku individu seperti malas, rendahnya tingkat pendidikan, dan putus sekolah perilaku sosial mencakup budaya konsumtif, beban keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (budaya easy going). Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Nenotes dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta mendukung pengembangan usaha lokal yang produktif. Selain itu, diperlukan dorongan bagi masyarakat untuk mengubah pola pikir menjadi lebih mandiri dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Faktor Struktural, Faktor Kultural, Desa Nenotes.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007: 4). Menurut Adisasmita (2006: 144) indikator kemiskinan masyarakat Desa yaitu: (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan), (5) menggunakan cara-cara pertanian tradisional, (6) kurangnya produktivitas usaha, (7) tidak adanya tabungan, (8) kesehatan yang kurang terjamin, (9) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (10) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak memiliki

akses untuk memperoleh air bersih, dan yang terakhir (12) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Adapun yang menjadi konsep kemiskinan ada tiga yaitu

1. Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret, ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan kebutuhan dasar kultur seperti pendidikan, keamanan, rekreasi dan sebagainya, disamping kebutuhan fisik. Konsep dan ukuran kemiskinan itu berbeda-beda di setiap daerah, contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa

pertanian dan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer.

2. Kemiskinan relatif dirumuskan dengan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, konsep kemiskinan ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kekayaan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak kritikan, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan juga beragam dan terus berubah- ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi tidak layak pada dua-lima tahun kedepan.
3. Kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal dan tidak Kelompok menurut ukuran kita berbeda di bawah kemiskinan, boleh jadi dtimenganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategis yang efektif untuk

penanggulangannya. (Sunyoto, 2006: 126)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dengan metode ini di gunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data yang berasal dari bahasa, pengalaman, dan refleksi subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh kondisi struktural dan kultural yang melingkupi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Desa Nenotes, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kemiskinan harus dilihat secara lebih menyeluruh melalui dua pendekatan penting, yaitu indikator struktural dan kultural.

1. Kerangka Teoretis dalam Memahami Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial (Todaro & Smith, 2020). John Rawls (1971) dalam A Theory of Justice menegaskan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai jika distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan

menguntungkan kelompok masyarakat yang paling lemah (the least advantaged).

Dalam studi kemiskinan, Oscar Lewis (1966) mengemukakan konsep *culture of poverty* yang menjelaskan bahwa kemiskinan dapat bertahan lintas generasi melalui pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat miskin. Sementara itu, teori ketergantungan (*dependency theory*) menyatakan bahwa struktur ekonomi yang timpang dan hubungan yang eksploitatif dapat memerangkap wilayah miskin dalam posisi subordinat terhadap pusat ekonomi (Frank, 1967). Kerangka teori ini digunakan untuk memahami indikator struktural dan kultural yang memengaruhi kemiskinan di Desa Nenotes, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Indikator Struktural dalam Kemiskinan Masyarakat Desa Nenotes

Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor struktural di Desa Nenotes meliputi:

- a. kebijakan Pembangunan yang Tidak Berpihak – Program pembangunan bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan potensi lokal, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
- b. Ketimpangan Pendapatan – Sebagian kecil warga memperoleh pendapatan lebih besar, sedangkan mayoritas bergantung pada sektor

pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim.

- c. Keterbatasan Lapangan Kerja – Minimnya diversifikasi ekonomi mengakibatkan masyarakat sulit beralih ke pekerjaan yang lebih produktif.
- d. Struktur Ekonomi yang Tidak Merata – Potensi sumber daya alam dan hasil pertanian belum dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Frank (1967) bahwa kemiskinan di wilayah pinggiran terjadi akibat ketergantungan ekonomi terhadap pusat yang mengendalikan akses modal dan pasar. Dalam konteks Desa Nenotes, keterbatasan infrastruktur ekonomi dan akses pasar menjadi penghalang utama peningkatan kesejahteraan.

3. Indikator Kultural dalam Kemiskinan Masyarakat Desa Nenotes.

Faktor struktural, kemiskinan di Desa Nenotes juga diperkuat oleh faktor kultural yang meliputi:

- a. Rendahnya Tingkat Pendidikan – Banyak anak yang putus sekolah sehingga generasi muda minim keterampilan kerja.
- b. Perilaku Malas dan Rendahnya Etos Kerja – Kurangnya dorongan untuk mencari peluang baru atau mengembangkan usaha mandiri.
- c. Budaya Konsumtif – Pendapatan lebih banyak digunakan untuk

konsumsi daripada investasi produktif.

- d. Beban Tanggungan Keluarga – Jumlah anggota keluarga yang besar membatasi kemampuan menabung.
- e. Budaya “Easy Going” – Sikap pasrah terhadap keadaan dan minim perencanaan masa depan

Temuan ini konsisten dengan teori culture of poverty dari Lewis (1966) yang menjelaskan bahwa kemiskinan bertahan karena adanya pola pikir dan perilaku yang diwariskan, seperti rendahnya aspirasi, ketidakpercayaan pada sistem, dan orientasi jangka pendek.

4. Sintesis Temuan dengan Teori Kesejahteraan

Jika dianalisis melalui perspektif teori kesejahteraan Rawls, masyarakat Desa Nenotes berada dalam posisi least advantaged, di mana hambatan struktural dan kultural secara bersamaan menghalangi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Bantuan tunai atau pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak disertai pemberdayaan dan perubahan pola pikir.

Hambatan struktural menutup akses terhadap peluang ekonomi, sedangkan hambatan kultural memperkuat sikap ketergantungan. Kedua faktor ini membentuk lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi yang bersifat integratif.

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Desa Nenotes

Berdasarkan temuan penelitian, strategi yang disarankan meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan – Menyediakan pendidikan gratis atau beasiswa, serta mencegah putus sekolah melalui dukungan ekonomi.
2. Pelatihan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal – Melatih masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan modern, dan kerajinan tangan.
3. Pengembangan Usaha Lokal – Membentuk kelompok usaha bersama atau koperasi yang memfasilitasi pemasaran produk.
4. Perluasan Lapangan Kerja – Membuka akses investasi desa dan membangun infrastruktur ekonomi.
5. Perubahan Pola Pikir Masyarakat – Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan untuk membentuk etos kerja yang kuat dan kemandirian ekonomi.

Pendekatan ini sesuai dengan model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Chambers, 1994), sehingga mereka berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan.

Indikator Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi

domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Menurut Kartasasmita (1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu: (a) kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi (persistent poverty) (b) kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (cyclical poverty); (c) kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (seasonal poverty); (d) kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (accidental poverty).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai indikator yaitu: Indikator struktural dan Indikator Kultural . Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan

pada pendapatan. Ketiga, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Keempat, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Indikator Keluar Dari Kemiskinan

Berdasarkan UU 13 tahun 2003, Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Upaya pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: (a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (b) memulihkan fungsi sosial alam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (e) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (f) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab penyelenggaraan sosial adalah pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut UU 11 tahun 2009, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: (a) penyuluhan dan bimbingan sosial; (b) pelayanan sosial; (c) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (d) penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (e) penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; (f) penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau (g) penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

KESIMPULAN

Kemiskinan yang terjadi di Desa Nenotes Kecamatan Santian Kabupaten

Timor Tengah Selatan tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi utama, yaitu faktor struktural dan kultural. Dari sisi struktural, kemiskinan diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, sempitnya lapangan kerja, serta kebijakan yang belum merata. Sementara itu, dari sisi kultural, kemiskinan diperkuat oleh pola pikir masyarakat yang cenderung pasrah, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, gaya hidup tradisional yang kurang produktif, serta peran gender yang terbatas.

Kedua indikator ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi yang menyentuh kedua aspek tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, memahami kemiskinan tidak cukup hanya melalui pendekatan ekonomi semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial-budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan agar masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan publik. Program-program bantuan sosial juga harus disalurkan secara tepat sasaran dan menyentuh kelompok masyarakat paling miskin.
2. Bagi Masyarakat Nenotes perlu memiliki kesadaran untuk berubah dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Mengembangkan usaha kecil, mendorong anak-anak untuk bersekolah, serta melibatkan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dapat menjadi langkah awal untuk keluar dari kemiskinan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan antar desa, agar solusi yang ditawarkan lebih tepat dan aplikatif berdasarkan kondisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamsyah B. 2008. Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Trisakti University Press.
- Nasikun. 2001. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 39.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Monthly Review Press.
- Lewis, O. (1966). *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty—San Juan and New York*. New York: Random House.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson Education.